

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara membutuhkan tata kelola pemerintahan yang efektif (*good corporate governance*) dalam era reformasi saat ini. Saat ini, Indonesia sedang menuju era keterbukaan dan transparansi. Dalam konteks transparansi dan keterbukaan ini, diharapkan Indonesia akan menjadi lebih transparan dalam menjalankan sistem kegiatan dan mengatur anggarannya. Prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah yang kuat dalam penganggaran, implementasi, dan pertanggungjawaban diperlukan untuk laporan keuangan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan dipahami dengan baik oleh pengguna, aparat pemerintah harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memahami sistem akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat memutuskan untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui penerapan desentralisasi atau otonomi daerah.<sup>1</sup> Desentralisasi merupakan proses penyerahan tanggung jawab pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, berdasarkan prinsip otonomi. Ini berarti memberikan pemerintah daerah wewenang untuk mengelola urusan di wilayahnya, yang meliputi manajemen, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya daerah.<sup>2</sup>

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karakteristik kualitatif dari laporan keuangan merupakan standar normatif yang harus dipenuhi dalam penyediaan informasi akuntansi

---

<sup>1</sup> Lutfiyani, A. R. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Subang).

<sup>2</sup> Pratama, A.Y. (2015). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, [online] Volume 28, Nomor 1, Februari 2015..

agar tujuan-tujuannya tercapai. Ada empat karakteristik yang menjadi prasyarat normatif yang penting bagi pemerintah untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang diharapkan: relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi merupakan pendukung utama dalam memastikan kualitas informasi keuangan daerah.<sup>3</sup>

Akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab individu terhadap tindakan atau keputusan yang diambilnya. Ini mencakup tanggung jawab seseorang terhadap pihak yang memberikan wewenang.<sup>4</sup> Dalam prinsipnya, akuntabilitas memerlukan transparansi, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehingga hasilnya dapat diukur dan dievaluasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan hasil pengelolaan keuangan serta melaporkan keberhasilan pengelolaan keuangan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan tingkat transparansi pemerintah daerah. Individu atau pihak yang bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan atas kepercayaan dari pihak yang memberikan wewenang, memiliki hak dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.<sup>5</sup>

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam *good governance*. Ini merujuk pada aliran informasi yang tidak terhalang di mana semua informasi mengenai proses pemerintahan, organisasi, dan entitas lainnya tersedia bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semuanya harus mudah dipahami dan dipantau. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparansi adalah tindakan memberikan informasi keuangan yang akurat dan terbuka kepada masyarakat, berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan komprehensif bagaimana pemerintah mengelola sumber daya

---

<sup>3</sup> Frista Chairina dan Tineke Wehartaty, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKPD Kota Surabaya", *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*-Vol.11 No. 1-Januari 2019- Halaman 31-39

<sup>4</sup> Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, dan Transparansi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desadi Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*,1,20-29.

<sup>5</sup> Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). *Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. Cogent Business and Management*, 7(1).

yang disediakan<sup>6</sup>. Pemerintah daerah dan masyarakatnya bertanggung jawab secara horizontal untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, yang akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Akhirnya, transparansi akan menghasilkan hubungan timbal balik yang bertanggung jawab antara masyarakat dan pemerintah daerah, memunculkan pemerintah daerah yang berintegritas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan warga.<sup>7</sup> Namun, penting juga untuk menyeimbangkan transparansi dengan menjaga kerahasiaan organisasi dan informasi, yang berdampak pada hak dan privasi individu.<sup>8</sup> Dengan informasi yang tersedia, masyarakat dapat segera memantau kebijakan publik untuk mencapai hasil yang optimal.

Di platform [jatim.bpk.go.id](http://jatim.bpk.go.id), BPK Jawa Timur akan segera mengirimkan tim auditor untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020. Keputusan ini diambil setelah penerimaan LKPD TA 2020 yang belum diaudit dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Jumat, 26 Maret 2021. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono, menerima LKPD TA 2020 yang belum diaudit tersebut secara langsung dari Bupati Pamekasan, H. Baddrut Tamam, melalui pertemuan tatap muka yang diadakan di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 serta pembatasan jumlah peserta. Dengan disampaikannya LKPD TA 2020 yang belum diaudit pada akhir pekan ini, jumlah pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah menyampaikan LKPD TA 2020 yang belum diaudit kepada BPK meningkat menjadi 22. Kepala Perwakilan berharap agar Bupati Pamekasan dan seluruh anggota stafnya dapat bekerja sama dengan baik selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Kepala Perwakilan menegaskan bahwa BPK Jawa Timur saat ini sedang giat meningkatkan pembangunan zona integritas dari Wilayah Bebas Korupsi

---

<sup>6</sup> Dr. H. A. Rusdiana, MM & Drs. Nasihudin, M. P. (2018). Akuntabilitas Kinerja Penelitian (Issue 1).

<sup>7</sup> Br Purba, R., & Mendina Amrul, A. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.

<sup>8</sup> Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah.

(WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sementara itu, Bupati Pamekasan menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum diaudit yang telah disampaikan ke BPK telah diperiksa ulang oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, dia yakin bahwa LKPD tersebut telah disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh pihak di Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga bersedia untuk bekerja sama dan mendukung pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, termasuk dalam memberikan konfirmasi dan menyediakan data pendukung terkait penyajian laporan keuangan. Bupati meyakini bahwa pemeriksaan oleh BPK adalah bagian dari upaya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.<sup>9</sup>

Menurut [pamekasanhebat.com](http://pamekasanhebat.com), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. Predikat WTP ini diberikan kepada Pemkab Pamekasan, yang merupakan penghargaan ketiga dalam delapan tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Pamekasan, Badrut Tamam. BPK RI memberikan predikat WTP atas laporan keuangan Pemkab Pamekasan dengan mempertimbangkan empat hal. Pertama, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dan keempat, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).<sup>10</sup>

Berdasarkan opini audit Kabupaten Pamekasan, besar kemungkinan instansi yang ada di Kabupaten Pamekasan cukup memahami tentang laporan keuangan salah satunya yaitu kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah pada bagian keuangan yang

---

<sup>9</sup> <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/bpk-jawa-timur-segera-mengaudit-lkpd-kabupaten-pamekasan-ta-2020/> Diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 09:21.

<sup>10</sup> <https://pamekasanhebat.com/2022/05/19/laporan-keuangan-pemkab-pamekasan-2021-raih-predikat-wtp/> Diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 09:14

bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pendapatan berupaya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan pendapatan daerah. Namun dalam prakteknya, implementasi SAP di lingkungan pemerintah tidaklah mudah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional, dan rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.<sup>11</sup>

Azza Nur Zubaidah dan Nugraeni (2023) melakukan studi mengenai Dampak Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

---

<sup>11</sup> Ibid.

di Pemerintah Kabupaten Sleman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sleman, sementara Transparansi memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sleman.<sup>12</sup>

Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, dan Imam Agus Faisol (2020) melakukan studi mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, dan Transparansi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Pamekasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hasil uji parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, pengetahuan kepala desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa.<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas dan transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh masing-masing variabel terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi kualitas laporan keuangan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam suatu pemerintahan. Oleh karena itu, judul penelitian ini dipilih sebagai **"Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan"**.

---

<sup>12</sup> Azza Nur Zubaidah dan Nugraeni, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman", *Jurnal Ilmiah MEA(Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol.7 No.3, 2023

<sup>13</sup> Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, dan Imam Agus Faisol, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan", *Journal of Accounting and Financial Issue* ISSN : Volume 1, Nomor 1, Mei 2020

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Apakah ada pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah ada pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan?
3. Apakah ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis.

### **1. Secara Akademis**

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan wawasan terhadap pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan atau perusahaan dan sebagai perbandingan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **2. Secara Praktis**

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan, serta sebagai bahan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam menentukan preferensi masyarakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan.

## **E. Asumsi Penelitian**

Asumsi yang dibuat dalam penelitian ini merupakan anggaran atau dalil mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan telah dibenarkan oleh peneliti. Fungsi adanya asumsi penelitian ialah sebagai landasan berfikir serta berperan dalam melakukan penelitian, untuk mempertegas variabel yang diteliti, serta untuk menentukan dan merumuskan hipotesis.<sup>14</sup> Adapun asumsi dasar pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> “Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Pamekasan: STAIN,2015),” n.d.

1. Akuntabilitas dapat menentukan kualitas laporan keuangan.
2. Transparansi dapat menentukan kualitas laporan keuangan.
3. Akuntabilitas dan transparansi dapat menentukan kualitas laporan keuangan.

## **F. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapat. Kedua kata itu kemudian digunakan secara bersama menjadi *hypothesis* dan penyebutan dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna. Pengertian ini kemudian diperluas dengan maksud sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian dengan data di lapangan.<sup>15</sup>

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Akuntabilitas (X1) secara parsial memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Y).

H<sub>2</sub>: Transparansi (X2) secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Y).

H<sub>3</sub>: Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Y).

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk memberikan batasan terhadap variabel-variabel penelitian, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi yang akan diteliti.<sup>16</sup> Terdapat dua jenis variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 85.

<sup>16</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2019), 67.

merupakan jenis variabel yang nilainya dapat diubah dan akan mempengaruhi variabel dependen selama penelitian atau eksperimen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Akuntabilitas (X1), dan Transparansi (X2). Sedangkan variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang terjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y).

#### 1. Variabel independen (X)

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari 2:

a. Akuntabilitas (X1), adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>17</sup> Adapun indikator dari Akuntabilitas yaitu:

1) Akuntabilitas publik<sup>18</sup>

b. Transparansi (X2), adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.<sup>19</sup> Adapun indikator dari Transparansi yaitu:

1) Informatif

2) Pengungkapan<sup>20</sup>

#### 2. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen terdiri dari:

a. Kualitas Laporan Keuangan, adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

---

<sup>17</sup> Mardiasmo. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2, 1-17.

<sup>18</sup> Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

<sup>19</sup> Dwiyanto, A. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>20</sup> Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

tujuannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.<sup>21</sup> Adapun indikator dari Kualitas Laporan Keuangan yaitu:

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dibandingkan
- 4) Dapat dipahami<sup>22</sup>

## H. Definisi Istilah

Definisi istilah atau definisi operasional digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelas makna dalam penelitian.<sup>23</sup> Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dan tujuan dari judul penelitian, sehingga peneliti perlu mendefinisikan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan, yakni:

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>24</sup>

### 2. Transparansi

Transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Risdiyanti N. S, Dewi S.P.A, dan Muhammad R.S, “Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 Edisi Khusus April 2016: 168 – 175

<sup>22</sup> Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis ilmiah, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 9.

<sup>24</sup> Mardiasmo. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2, 1-17.

<sup>25</sup> Dwiyanto, A. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

### 3. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.<sup>26</sup>

## I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Azza Nur Zubaidah dan Nugraeni	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Studi ini menerapkan metode pendekatan kuantitatif dan memakai alat statistik dalam rangka menguji hipotesis.	Hasil penelitian diperoleh bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Sleman sedangkan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Sleman. <sup>27</sup>	Terdapat perbedaan objek penelitian yang berlokasi di Kabupaten Sleman.
2.	Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, dan	Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat,	Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.	Hasil penelitian diperoleh bahwa hasil uji parsial akuntabilitas,	Terdapat perbedaan variabel independen yang

<sup>26</sup> Risdhayanti N. S, Dewi S.P.A, dan Muhammad R.S, “Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 Edisi Khusus April 2016: 168 – 175

<sup>27</sup> Azza Nur Zubaidah dan Nugraeni, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol.7 No.3, 2023

	Imam Agus Faisol	Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan		partisipasi masyarakat, pengetahuan kepala desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan. <sup>28</sup>	diteliti yaitu partisipasi masyarakat dan pengetahuan kepala desa.
3.	Hayyin Rizki Utami dan Tantina Haryati	<i>Budgetary Goal Characteristics</i> , Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Dimoderasi Komitmen Organisasi	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>budgetary goal characteristics</i> , akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep value for money di BPKPD Kabupaten Pamekasan. <sup>29</sup>	Terdapat perbedaan variabel independen yang diteliti yaitu <i>budgetary goal characteristics</i> . Selain itu, terdapat perbedaan variabel dependen yang diteliti yaitu kinerja anggaran dimoderasi komitmen organisasi.
4.	Novia Rosy Pratiwi, Nur Diana, dan Junaidi	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk	Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.	Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Gondang	Terdapat perbedaan variabel independen yang diteliti yaitu partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat perbedaan objek penelitian yang berlokasi di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

<sup>28</sup> Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, dan Imam Agus Faisol, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan", *Journal of Accounting and Financial Issue* ISSN : Volume 1, Nomor 1, Mei 2020

<sup>29</sup> Hayyin Rizki Utami dan Tantina Haryati, "*Budgetary Goal Characteristics*, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Dimoderasi Komitmen Organisasi", *Jambura Economic Education Journal* Volume 5 No 2 July 2023

				Kabupaten Nganjuk. <sup>30</sup>	
5.	Hanif Yusuf Saputro dan Erfan Muhammad	Efek Akuntabilitas dalam Memediasi Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Desa di Madura	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif eksplanatif yang menguji hubungan pengaruh antar variabel.	Hasil penelitian secara langsung menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja desa, sedangkan analisis secara tidak langsung menunjukkan bahwa akuntabilitas mampu memediasi kualitas pelaporan keuangan terhadap kinerja desa di Madura. <sup>31</sup>	Terdapat perbedaan variabel dependen yang diteliti yaitu kinerja desa.

<sup>30</sup> Novia Rosy Pratiwi, Nur Diana, dan Junaidi, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk", *E-JRA* Vol. 11 No. 05 Agustus 2022.

<sup>31</sup> Hanif Yusuf Saputro dan Erfan Muhammad dengan judul "Efek Akuntabilitas dalam Memediasi Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Desa di Madura". *Jurnal PETA*, Vol.7 No. 2 Juli 2022 Halaman 285-309.